

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada awal bulan Maret 2020 adalah pertama kali pandemi Covid-19 masuk di Indonesia. Disebut sebagai pandemi karena telah menyebar dan terjadi secara bersamaan diseluruh dunia. Untuk memberhentikan penyebaran virus tersebut pemerintah Indonesia memberlakukan *social distancing*, karantina wilayah dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang menyebabkan terbatasnya kegiatan masyarakat seperti pekerjaan, jual beli dan lainnya. Permasalahan yang muncul salah satunya yaitu pada sektor ekonomi keluarga yang terjadi hampir disetiap negara. Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia menyebabkan penurunan ekonomi keluarga baik di perkotaan sebanyak (78,3%) dan pedesaan (74,3%) pada bulan Oktober-November 2020 (SMERU et al., 2021). Semenjak tahun 2020 hingga akhir tahun 2022 ekonomi keluarga masih belum berubah bahkan semakin menurun sebesar 82% (UNICEF, 2022).

Dampak sangat nyata dan mudah dikenali adalah melemahnya konsumsi rumah tangga atau daya jual beli masyarakat. Selama ini masyarakat mengalami penurunan daya jual beli yang sangat besar dalam sektor ekonomi keluarga. PPKM terus berlanjut dengan berbagai aturan pengetatan dan mencegah masyarakat melakukan kegiatan ekonomi. Satu dari tiga responden rumah tangga memiliki usaha mikro maupun kecil dan usaha yang dijalankan sebagai sumber pendapatan yang penting untuk perekonomian keluarga. Namun saat terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 mengalami dampak penurunan yaitu sekitar 87,5%. Para pelaku usaha mikro dan kecil memiliki kekhawatiran paling utama yaitu meningkatnya biaya operasional, menurunnya pelanggan dan menurunnya penerimaan jual beli (SMERU et al., 2021). Pada tahun 2022 8 dari 10 pelaku usaha mengalami penurunan penjualan dan 84,20% UMKM mengalami penurunan pendapatan, sedangkan 62,21% UMKM mengalami kendala keuangan untuk membayar karyawan dan operasional (Kristianto, 2022).

Di Indonesia pandemi yang terus meningkat dari tahun ke tahun mengakibatkan sulitnya pendapatan pada setiap UMKM. UMKM merupakan bagian dari perekonomian Nasional yang memiliki potensi besar untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan UMKM memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi negara. Indonesia memiliki UMKM terbanyak se-ASEAN sebesar 99,9% atau 65,4 juta (UNCTAD, 2022). Dengan data yang begitu besar UMKM menjadi begitu penting dan menarik bagi Indonesia dan dengan penurunan pendapatan yang terjadi maka menjadi kekhawatiran untuk perekonomian negara.

Dalam situasi krisis ekonomi seperti ini, sektor UMKM sangat membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Upaya meningkatkan pendapatan pada UMKM, pemerintah mengusahakan dengan mengadakan program pelatihan kewirausahaan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 yaitu tentang penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) dengan salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan potensi kewirausahaan, mengurangi pengangguran dan kemiskinan melalui peningkatan kesempatan berwirausaha.

Salah satu Program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk peningkatan wirausaha adalah dengan Program Jakarta *Entrepreneurship* (Jakpreneur) yang merupakan penyempurnaan standarisasi kerja dalam program *One Kecamatan One for Center Entrepreneurship* (OK OCE) yang dimulai pada tahun 2018 dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu atau disingkat menjadi PKT pada tahun 2019 (Mahmudah & Asari, 2021). Jakpreneur memfasilitasi para pelaku UMKM agar naik kelas, mulai dari usaha mikro menjadi kecil atau usaha kecil menjadi menengah dengan tahapan yang dibutuhkan. Para pelaku UMKM akan mendapatkan binaan khusus melalui program Jakpreneur.

Jakpreneur sendiri memiliki enam program yaitu pelatihan, pendampingan wirausaha, perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan dan fasilitas permodalan (Pergub, 2020). Pendampingan pada Jakpreneur juga membantu untuk mengurus segala perizinan seperti IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil), NIB (Nomor Induk Berusaha), PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga), Sertifikasi Halal, dan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual). Para binaan Jakpreneur juga akan diajarkan bagaimana cara foto produk dengan baik, membuat kreasi kemasan produk yang menarik untuk pelanggan, dan dapat menjual produk diseluruh pasar Indonesia.

Para pelaku UMKM akan didampingi oleh satu pendamping disetiap kecamatan agar mempermudah dalam peningkatan usaha, seperti halnya dalam

pengumpulan berkas untuk legalitas, berkonsultasi mengenai usaha dan lainnya. Menurut data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) Provinsi DKI Jakarta tahun 2022, jumlah terbanyak peserta Jakpreneur disetiap Kecamatan DKI Jakarta adalah di Kecamatan Cipayung yang memiliki 539 peserta. Artinya para pelaku usaha tersebut ada kemauan untuk meningkatkan usahanya. Namun pada Kecamatan Cipayung mengalami penurunan pendapatan saat pandemi Covid-19 yang berdampak buruk pada pelaku usaha. Dikarenakan banyak UMKM yang merasakan penurunan pendapatan, tidak menghalangi Jakpreneur untuk membina para pelaku UMKM agar bangkit dan semangat dalam menjalankan usaha. Dari pemaparan tersebut Jakpreneur mempunyai peranan penting kepada para pelaku UMKM di Jakarta.

Selain permasalahan pada penurunan pendapatan, UMKM juga mengalami permasalahan pada sumber daya manusia yang berperan penting untuk peningkatan usaha. Minimnya sumber daya manusia dalam hal berinovasi dan kurangnya keterampilan dalam berwirausaha memicu penurunan pembelian, menimbulkan rasa jenuh pada pelanggan akan produk yang sama dengan produk yang dijual di berbagai pasar. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Rudy Salahuddin mengatakan, walaupun UMKM berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi tetapi UMKM masih terkendala dalam hal daya saing, kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, sulit melakukan pemasaran dan kreativitas yang rendah (Yuniartha, 2019). Kuantitas UMKM di Indonesia tidak diimbangi dengan adanya potensi untuk menjadi wirausaha yang lebih besar, dikarenakan beberapa kendala salah satunya adalah sumber daya manusia yang memiliki kualitas rendah, baik dari pemilik maupun pegawainya maka akan sangat sulit untuk tumbuh menjadi lebih besar (Admin, 2017). Sumber daya manusia adalah satu hal penting dalam menjalankan usaha karena dapat digunakan untuk meningkatkan usaha, sementara itu pola pikir UMKM harus dirubah menjadi pelaku usaha yang berkarakter yaitu inovasi atau menjadi kreatif, mempunyai kemampuan yang kuat terhadap usaha dan mengikuti perkembangan lingkungan usaha seperti teknologi dan selera pelanggan (Kemenkeu, 2022). Inovasi, proaktif dan pengambilan risiko

merupakan bagian dari *entrepreneurial orientation* yang menjadi permasalahan para pelaku UMKM.

Menurut penelitian Acosta et al. (2018), bahwa memperkenalkan Inovasi, proaktif dan pengambilan risiko atau sebagai dimensi *entrepreneurial orientation* penting dilakukan untuk kinerja yang lebih baik pada usaha kecil maupun menengah. Hasil dari penelitian Morgan et al. (2015) dalam mengembangkan suatu produk baru dalam usaha, *entrepreneurial orientation* memiliki dampak yang positif. Jika para pelaku UMKM dapat mengembangkan produk atau menghasilkan produk dengan baik maka usaha yang dijalankan akan terus meningkat. Permasalahan yang sering dijumpai pada saat berwirausaha terlihat tidak adanya strategi dalam membangun suatu usaha, sehingga menimbulkan permasalahan baru, maka dari itu pentingnya suatu *entrepreneurial orientation* dalam UMKM. Selain itu UMKM dengan *entrepreneurial orientation* yang tinggi akan lebih hemat biaya atau biaya lebih efektif (Tang & Hull, 2012), memiliki kapasitas belajar yang lebih tinggi (Dada & Fogg, 2016), dan dapat mengungguli perusahaan (Engelen et al., 2014). Berbagai masalah yang terjadi pada UMKM tidak terlepas dari pengaruh sumber daya manusia itu sendiri baik dari pegawai maupun pemilik. UMKM cukup mengalami kesulitan untuk meningkatkan usahanya. Maka dari itu penting untuk menerapkan *entrepreneurial orientation* dalam menjalankan usaha. Penelitian ini berusaha untuk melihat faktor *entrepreneurial orientation* apa yang paling dominan pada UMKM yang ingin meningkatkan usahanya melalui program Jakpreneur sehingga faktor *entrepreneurial orientation* yang kurang atau belum diterapkan dapat terlihat dan dapat segera diterapkan untuk meningkatkan usahanya. Sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan dengan judul “Analisis Faktor *Entrepreneurial Orientation* Pada Program Jakpreneur”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Pada bulan Maret tahun 2020 telah terjadi pandemi Covid-19 di Indonesia.

2. Pada tahun 2022 telah terjadi penurunan pendapatan ekonomi keluarga dan penurunan pendapatan UMKM sebesar 82% dari jumlah UMKM sebanyak 65,4 juta.
3. Pada tahun 2022 UMKM mengalami kendala keuangan untuk membayar karyawan dan operasional sebesar 62,21% dari jumlah UMKM sebanyak 65,4 juta.
4. Para pelaku usaha melupakan semangat dalam berwirausaha antara lain dalam hal inovasi, pantang menyerah, berkemauan untuk berkorban dan semangat dalam mengambil risiko.

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan paparan masalah yang telah diidentifikasi, maka peneliti akan membatasi subjek penelitian agar pembahasan tidak terlalu luas dan dapat dilakukan penelitian secara mendalam yaitu analisis faktor *entrepreneurial orientation* pada program Jakpreneur.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang dikemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja faktor *entrepreneurial orientation* pada program Jakpreneur yang paling dominan?.

1.5. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan dan menambah kajian ilmu keluarga dalam teori kewirausahaan.

b. Manfaat Praktis

secara praktis penelitian ini diharapkan dapat:

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan mengenai *entrepreneurial orientation* bahwa pentingnya menerapkan *entrepreneurial orientation* untuk peningkatan usaha.

2. Bagi UMKM

Sebagai informasi yang dapat digunakan untuk peningkatan usaha melalui *entrepreneurial orientation*.

3. Bagi Universitas

Dapat menjadi penambah ilmu pengetahuan dan referensi untuk mahasiswa yang akan melakukan penelitian terkait *entrepreneurial orientation*.

4. Bagi Pemerintah

Sebagai sumbangan pemikiran dan masukan terutama pada program pelatihan kewirausahaan khususnya pada peningkatan UMKM melalui *entrepreneurial orientation*.

